

Migrasi dan Identitas: Kebijakan Integrasi Pekerja Migran di Swedia dan Belgia di Tengah Sentimen Anti-Imigrasi

Emi Peter¹

¹Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi

*Email Korespondensi: peteremi69@gmail.com

Abstract (english):

This study analyzes the effectiveness of migrant worker integration policies in Sweden and Belgium in the context of rising right-wing populism and xenophobic sentiment. Using a descriptive qualitative approach and literature study method, this research evaluates how both countries formulate integration policies and how these policies affect migrants' adaptation and social identity. The findings reveal that although Sweden implements formally inclusive policies, structural discrimination and the lack of migrant representation continue to hinder integration. Meanwhile, Belgium's selective approach has led to identity fragmentation between integrated and marginalized migrant groups. Right-wing populist narratives further constrain policy space by framing migrants as threats to national identity. Integration, as articulated by Alba and Nee (2003), involves not only structural access but also social acceptance. These findings underscore the importance of institutional reform, sustained social support, and inclusive public discourse to achieve sustainable migrant integration.

Keywords: *Migrant integration ; xenophobia ; Sweden ; Belgium ; social identity*

Abstrak (Bahasa):

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan integrasi pekerja migran di Swedia dan Belgia dalam konteks meningkatnya populisme kanan dan sentimen xenophobia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi literatur, penelitian ini mengevaluasi bagaimana dua negara tersebut membentuk kebijakan integrasi dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi proses adaptasi serta identitas sosial para migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Swedia mengadopsi kebijakan yang inklusif secara formal, diskriminasi struktural dan representasi yang minim terhadap migran masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, Belgia menerapkan pendekatan selektif yang menciptakan fragmentasi identitas antara kelompok migran yang terintegrasi dan yang termarginalisasi. Wacana populisme kanan turut mempersempit ruang kebijakan dengan menempatkan migran sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Integrasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori Alba dan Nee (2003), tidak hanya menyangkut akses struktural tetapi juga penerimaan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi institusional, dukungan sosial, dan narasi publik yang lebih inklusif untuk mewujudkan integrasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Integrasi migran ; xenophobia ; Swedia ; Belgia ; identitas sosial*

Tentang Penulis:

Emi Peter, Penulis memulai menempuh studi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2023, saat ini penulis masih menempuh studi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Universitas Slamet Riyadi. Email: peteremi69@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional menjadi salah satu dinamika penting dalam studi hubungan internasional kontemporer. Mobilitas manusia lintas negara tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konflik bersenjata, perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan global. Di kawasan Eropa, gelombang migrasi ini telah menimbulkan tantangan signifikan bagi negara-negara penerima dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Swedia dan Belgia menjadi dua kasus yang menarik karena memiliki sejarah panjang sebagai negara tujuan migran dan telah menerapkan pendekatan kebijakan integrasi yang berbeda. Swedia cenderung progresif dan berbasis hak sosial, sementara Belgia menghadapi hambatan struktural akibat kompleksitas politik dalam negerinya. Kedua negara sama-sama berupaya mengintegrasikan pekerja migran ke dalam sistem masyarakat, namun tidak terlepas dari tekanan populisme dan meningkatnya sentimen anti-imigrasi (Padmi & Yulianti, 2021).

Kebijakan integrasi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari negara-negara Eropa, termasuk Swedia dan Belgia, menyeimbangkan antara prinsip hak asasi manusia, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan tekanan politik domestik yang sering kali diwarnai oleh *populisme* dan *xenophobia*. Swedia, misalnya, dikenal dengan kebijakan sosial progresifnya, sementara Belgia menghadapi tantangan besar akibat keragaman etnis yang tinggi dan fragmentasi politik. Masing-masing negara mengembangkan kebijakan yang berbeda dalam menangani pekerja migran, mulai dari akses terhadap jaminan sosial hingga program pelatihan bahasa dan kerja, namun hasilnya tidak selalu mencerminkan keberhasilan integrasi sosial secara menyeluruh. Di banyak kasus, kebijakan yang terlihat inklusif di atas kertas justru gagal mengatasi diskriminasi struktural di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan penerimaan sosial dan politik (De Coninck & Solano, 2023).

Di sisi lain, meningkatnya populisme kanan di banyak negara Eropa telah menumbuhkan wacana politik yang memojokkan komunitas migran, termasuk pekerja migran legal sekalipun. Sentimen anti-imigrasi tersebut bukan hanya menjadi narasi media, tetapi telah menjadi faktor yang memengaruhi perumusan kebijakan publik secara langsung. Diskursus publik yang memuat stigma terhadap migran sebagai beban sosial, ancaman keamanan, dan simbol "kegagalan multikulturalisme" menciptakan hambatan struktural dan psikososial dalam proses integrasi. Akibatnya, pekerja migran tidak hanya harus menyesuaikan diri secara ekonomi dan budaya, tetapi juga menghadapi diskriminasi sistemik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering kali terjebak dalam lapangan kerja yang tidak stabil dan berupah rendah, terpinggirkan dari akses ke pendidikan dan perumahan layak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat eksklusi sosial dan memperburuk ketegangan antara komunitas migran dan warga lokal (Pratama, 2021).

Penting untuk mengkaji bagaimana negara-negara seperti Swedia dan Belgia merancang dan mengimplementasikan kebijakan integrasi di tengah tekanan sosial-politik. Kebijakan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia sering kali bertabrakan dengan tuntutan populis yang menginginkan pembatasan akses migran terhadap layanan publik. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan integrasi bukan hanya soal ketenagakerjaan atau hukum semata, tetapi menyangkut identitas dan rasa memiliki seorang migran terhadap masyarakat tempat ia tinggal (Zati Rizqi Muhammad, 2024). Studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dinamika kebijakan integrasi di dua negara, tetapi juga untuk menggali bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pembentukan identitas para pekerja migran. Identitas, sebagai konstruksi sosial, sangat dipengaruhi oleh pengakuan institusional dan penerimaan sosial. Ketika pekerja migran mengalami eksklusi baik secara formal maupun informal maka terbentuklah identitas yang terfragmentasi, yang berpotensi menimbulkan alienasi dan resistensi terhadap nilai-nilai dominan masyarakat lokal.

LANDASAN TEORITIK

Teori Integrasi

Teori Integrasi dikembangkan secara mendalam oleh Richard Alba dan Victor Nee pada tahun 2003 melalui karya mereka *Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration*. Teori ini memandang integrasi sebagai proses dua arah, di mana imigran beradaptasi dengan norma dan struktur masyarakat penerima, sementara masyarakat penerima juga mengalami perubahan dalam merespons kehadiran migran. Fokus utama teori ini tidak hanya pada integrasi struktural—seperti partisipasi dalam pasar tenaga kerja, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik—tetapi juga pada integrasi sosial dan identitas, termasuk penerimaan budaya dan rasa memiliki dalam komunitas. Berbeda dari teori asimilasi klasik yang menekankan pelarutan budaya asal, pendekatan integrasi menekankan keberlanjutan identitas migran dalam konteks kohesi sosial. Seiring waktu, teori ini berkembang dan banyak digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan imigrasi dan integrasi di berbagai negara maju, khususnya dalam konteks multikulturalisme dan hak asasi manusia (Alba & Nee, 2015).

Teori Populisme dan Xenophobia

Teori Populisme dan Xenophobia banyak dipopulerkan oleh Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser dalam buku *Populism: A Very Short Introduction* yang diterbitkan pada tahun 2017. Mereka menjelaskan populisme sebagai ideologi tipis yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok utama: "rakyat murni" versus "elit yang korup". Dalam konteks ini, populisme kanan sering kali disertai dengan sentimen xenophobia, yaitu ketakutan atau kebencian terhadap orang asing, yang digunakan sebagai strategi politik untuk memobilisasi dukungan. Populisme cenderung menyederhanakan masalah kompleks seperti migrasi menjadi ancaman terhadap identitas nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial. Seiring meningkatnya tekanan politik domestik di berbagai negara, teori ini menjadi alat penting untuk memahami bagaimana wacana populis memengaruhi pembentukan opini publik dan arah kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan imigrasi, kewarganegaraan, dan integrasi sosial (Cristóbal Rovira Kaltwasser & Mudde, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam realitas sosial-politik yang kompleks serta menggali makna di balik kebijakan integrasi pekerja migran di Swedia dan Belgia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks historis, kultural, dan institusional yang melatarbelakangi formulasi kebijakan, serta memahami bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan migran dalam kerangka hubungan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), dengan menelaah secara sistematis berbagai dokumen akademik, kebijakan publik, buku, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan terkini (Lamont, 2015).

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*), yaitu dengan mengelompokkan dan mengkaji data berdasarkan tema-tema kunci seperti model integrasi (asimilatif, multikultural, inklusif), dinamika sentimen anti-imigrasi, serta pembentukan dan tantangan identitas sosial para pekerja migran. Prosedur penelitian mencakup tahap-tahap penting mulai dari penentuan fokus kajian, pemilihan literatur, pengkodean isi, hingga interpretasi data secara naratif untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam dan reflektif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar analisis dokumen, yang disusun untuk menilai aspek struktural, aspek, serta aspek identitas. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang utuh terhadap kebijakan integrasi, tetapi juga memungkinkan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan inklusivitas kebijakan

dalam merespons tekanan social politik yang berkembang di kedua negara (Ide & Mello, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Efektivitas Kebijakan Integrasi Struktural di Swedia

Analisis terhadap literatur terbaru mengungkap bahwa Swedia menerapkan kebijakan integrasi struktural yang relatif inklusif dengan akses penuh ke pasar tenaga kerja, pelayanan publik, dan program bahasa intensif. Namun, para pekerja migran tetap menghadapi diskriminasi rasial dan hambatan struktural di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Studi Diversity Barometer menunjukkan bahwa diskriminasi sistemik tetap hadir bahkan dalam institusi formal, yang menandakan bahwa kebijakan hukum tidak cukup tanpa perubahan perilaku institusional dan sosial yang mendalam. Hal ini sejalan dengan teori integrasi yang dikembangkan oleh Richard Alba dan Victor Nee (2003), yang memandang bahwa integrasi bukan hanya proses satu arah di mana migran menyesuaikan diri dengan masyarakat penerima, tetapi juga menuntut perubahan dalam norma dan struktur sosial negara penerima. Selain itu, kurangnya representasi migran dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan memperparah kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik sehari-hari. Hal ini membuat banyak kebijakan integrasi tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan riil komunitas migran (Groglopo dkk., 2023a).

Pendekatan Selektif di Belgia dan Fragmentasi Sosial

Di Belgia, penelitian mengonfirmasi adanya pendekatan kebijakan migrasi yang lebih selektif, terutama melalui persyaratan administratif yang ketat seperti penguasaan bahasa nasional, partisipasi dalam kursus kewarganegaraan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dominan. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat proses integrasi bagi kelompok migran yang dianggap memiliki potensi adaptasi tinggi. Dalam praktiknya, kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi migran dengan latar belakang pendidikan tinggi atau asal negara yang secara budaya lebih dekat dengan masyarakat Belgia. Namun, kebijakan ini juga menyisihkan kelompok migran lainnya, terutama mereka yang datang dari negara-negara konflik atau yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya ekonomi dan Pendidikan (Dekker, 2017).

Dampaknya, model ini menciptakan dua kelas migran yang berbeda: mereka yang “diakui” secara institusional dan sosial karena mampu memenuhi persyaratan integrasi formal, dan mereka yang tetap termarginalisasi karena dianggap tidak cukup “bernilai”. Fenomena ini menguatkan kritik terhadap pendekatan integrasi yang terlalu struktural tanpa memperhatikan aspek sosial-kultural sebagaimana diuraikan oleh Alba dan Nee (2003), yang menekankan pentingnya penerimaan budaya dan rasa memiliki dalam proses integrasi. Situasi ini memperkuat fragmentasi identitas, memperlemah kohesi sosial, dan menciptakan ketegangan antar komunitas. Dalam jangka panjang, kebijakan yang terlalu selektif ini dapat memperbesar jurang sosial dan memperkuat siklus eksklusivitas yang sulit diputus oleh kebijakan publik yang bersifat normatif semata (Van Meeteren & Sur, 2020a).

Populisme Kanan dan Sentimen Xenophobia dalam Kebijakan Integrasi

Temuan berbagai jurnal dan laporan kebijakan menunjukkan bahwa wacana populisme kanan dan xenophobia semakin kuat mewarnai arah kebijakan integrasi di negara-negara Eropa, termasuk Swedia dan Belgia. Partai-partai populis seperti Sweden Democrats di Swedia dan Vlaams Belang di Belgia memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi agenda politik nasional. Mereka secara aktif mengadvokasi konsep

welfare chauvinism, yaitu gagasan bahwa layanan sosial negara hanya pantas diberikan kepada “warga asli” dan bukan kepada imigran, termasuk pekerja migran yang sah secara hukum. Dalam narasi mereka, imigran diposisikan sebagai beban ekonomi, penyebab krisis sosial, bahkan ancaman terhadap identitas nasional dan nilai-nilai lokal (Eick & Larsen, 2022). Wacana ini sesuai dengan kerangka teori populisme dan xenophobia dari Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser (2017), yang melihat populisme sebagai ideologi tipis yang membelah masyarakat antara “rakyat murni” dan “elit korup”, serta memperkuat ketakutan terhadap kelompok luar.

Di Swedia, meskipun negara ini dikenal dengan sistem kesejahteraan yang inklusif, tekanan politik dari kelompok populis kanan telah memaksa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan integrasi, terutama setelah krisis pengungsi 2015. Langkah-langkah seperti pemotongan tunjangan, pengetatan syarat izin tinggal, dan pembatasan reunifikasi keluarga mulai diterapkan untuk meredam kecemasan dari kelompok anti-imigrasi. Hal serupa terjadi di Belgia, di mana kekuatan populisme kanan mendorong wacana kebijakan berbasis nilai kebudayaan lokal, yang memaksa migran untuk menyesuaikan diri secara penuh dan cepat, sambil mengurangi dukungan negara jika dianggap gagal berintegrasi. Kebijakan-kebijakan semacam ini memperlihatkan bagaimana tekanan populisme dapat mengubah pendekatan integrasi dari yang awalnya inklusif dan berbasis hak menjadi selektif dan bersyarat (Haenraets & Roosma, 2024). Tidak hanya itu, populisme kanan dan xenophobia telah menciptakan iklim sosial yang tidak ramah terhadap migran, yang berdampak buruk pada pembentukan identitas dan rasa memiliki pekerja migran terhadap masyarakat tempat mereka tinggal. Fenomena ini membenarkan pandangan Mudde dan Kaltwasser (2017) bahwa populisme bukan sekadar strategi politik, tetapi juga merupakan ideologi yang secara aktif membentuk ulang batas-batas keanggotaan sosial dan nasionalitas dalam masyarakat kontemporer (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2018).

Fragmentasi Identitas dan Adaptasi Migran

Analisis ini juga menunjukkan bahwa migran menghadapi fragmentasi identitas akibat pemisahan antara kebutuhan adaptasi struktural dan dukungan sosial berkelanjutan. Sebagian migran menciptakan komunitas informal atau diaspora semi-teritorial sebagai strategi untuk mempertahankan budaya asal sekaligus membangun solidaritas sosial dalam situasi eksklusi. Temuan ini mendukung pandangan dalam teori integrasi bahwa integrasi sosial tidak selalu mengikuti integrasi struktural; kehadiran formal dalam sistem belum menjamin penerimaan sosial yang sejati (Alba & Nee, 2015). Migran Muslim generasi kedua dan ketiga di Brussels mengalami kesenjangan antara adanya kewarganegaraan resmi dan ketidaksetaraan sosial nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum semata tidak cukup untuk membangun rasa memiliki apabila tidak disertai dengan penerimaan sosial yang sejati. Fragmentasi identitas juga memicu dilema loyalitas dan ketegangan psikososial, terutama bagi generasi muda migran yang tumbuh di tengah dua sistem nilai yang berbeda. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat keterlibatan aktif migran dalam kehidupan sipil dan politik negara penerima. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekecewaan terhadap proses integrasi yang timpang mendorong lahirnya sikap apatis atau resistensi terhadap institusi negara. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi harus dipahami tidak hanya sebagai proses ekonomi dan administratif, tetapi juga sebagai rekonsiliasi identitas antara individu dan masyarakat yang lebih luas (Torrekens dkk., 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan beberapa poin utama: (1) kebijakan integrasi yang bersifat inklusif formal di Swedia masih belum mampu menghapus diskriminasi struktural; (2) pendekatan selektif di Belgia menghasilkan fragmentasi sosial; (3) populisme kanan dan retorika xenophobia memperkuat pembatasan kebijakan integrasi; dan (4) pekerja migran mengadopsi strategi adaptasi identitas inklusif-informal sebagai respons terhadap eksklusi institusional dan sosial. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh sejauh

mana kebijakan tersebut diterima dan didukung oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, peran opini publik dan media menjadi sangat krusial dalam membentuk ekosistem sosial yang mendukung keberagaman.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Swedia memiliki kebijakan integrasi struktural yang inklusif—meliputi akses penuh ke pasar kerja, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan—realitas di lapangan masih ditandai oleh praktik diskriminasi rasial dan sekat institusional. Migran didiskriminasi dalam seleksi pekerjaan, pengakuan kualifikasi, serta sistem pelayanan kesehatan, yang menunjukkan adanya gap antara kebijakan tertulis dan implementasi nyata. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas formal belum cukup jika tidak dibarengi dengan reformasi budaya institusi. Tanpa dukungan sistemik dan kesadaran sosial yang kuat, kebijakan cenderung berhenti pada level simbolis (Groglopo dkk., 2023b).

Diskriminasi yang bersifat terselubung (*covert discrimination*) juga memperparah tantangan integrasi, di mana banyak migran mengalami penolakan tidak langsung yang sulit dibuktikan secara hukum, seperti stereotip dalam rekrutmen tenaga kerja atau pembatasan akses perumahan. Kegagalan sistem untuk merespons bentuk diskriminasi semacam ini menyebabkan turunnya kepercayaan migran terhadap lembaga publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak rasa memiliki dan keterikatan sosial mereka terhadap negara penerima. Oleh karena itu, upaya integrasi tidak cukup hanya melalui pendekatan kebijakan, melainkan juga perlu menyasar transformasi budaya institusional dan perubahan sikap masyarakat secara luas. Peningkatan partisipasi migran dalam pengambilan keputusan kebijakan publik juga penting sebagai bentuk pengakuan atas suara dan kebutuhan mereka yang selama ini terpinggirkan.

Di Belgia, kebijakan integrasi yang didasarkan pada persyaratan administrative seperti tes bahasa dan kursus budaya telah menciptakan dua lapis migran: kelompok yang diakui dan kelompok yang tersisih. Fragmentasi identitas ini selaras dengan temuan bahwa kebijakan integrasi bersifat ambivalen dan tergantung pada framing lokal, di mana migran hanya dianggap bagian dari masyarakat jika memenuhi kriteria tertentu. Dampaknya adalah melemahnya kohesi sosial, munculnya ketegangan antar komunitas migran, dan meningkatnya rasa ketidakadilan di kalangan mereka yang tidak terpenuhi syarat formal. Selain memperlemah solidaritas antar kelompok, kondisi ini juga mendorong terbentuknya segregasi sosial berbasis etnis dan status hukum. Dalam jangka panjang, fragmentasi ini dapat memicu siklus eksklusi yang memperburuk marginalisasi sosial dan politik kelompok migran (Van Meeteren & Sur, 2020b).

Wacana populisme kanan dan xenophobia, yang dipelopori partai seperti Sweden Democrats dan Vlaams Belang, telah mendorong kebijakan welfare chauvinism—yang membatasi akses migran terhadap tunjangan sosial dan layanan publik. Narasi ini membingkai migran sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan beban ekonomi, serta memaksa perubahan kebijakan integrasi Swedia pasca-2015 menuju model yang lebih protektif dan selektif. Retorika populis seperti ini secara tidak langsung memengaruhi kebijakan mainstream melalui tekanan opini publik. Akibatnya, nilai-nilai multikulturalisme digantikan oleh politik asimilasi yang bersyarat. Dalam kondisi ini, kebijakan integrasi menjadi alat kontrol sosial, bukan lagi instrumen pemberdayaan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi ruang kebijakan, tetapi juga mempersempit ruang sosial migran untuk mengartikulasikan identitas dan hak-haknya secara setara (Eick & Larsen, 2022).

Sebagian migran merespon eksklusi ini dengan mengembangkan komunitas informal atau diaspora semi-teritorial—ruang sosial alternatif yang mendukung pelestarian budaya dan solidaritas internal. Namun, kehidupan ganda ini, di satu sisi bertujuan adaptif, di sisi lain memperkuat fragmentasi identitas karena eksistensi dua ruang identitas yang terpisah—dimana status legal tidak selalu berbanding lurus dengan kehadiran sosial mereka.

Hal ini menjadi tantangan khusus bagi generasi muda migran, yang terjebak di antara tuntutan integrasi dan tekanan untuk mempertahankan warisan budaya. Fragmentasi ini, jika tidak ditangani secara inklusif, dapat memperkuat polarisasi sosial jangka Panjang. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan integrasi tidak hanya bergantung pada aspek struktural, tetapi juga membutuhkan transformasi kultural dan institusional yang mendalam. Diperlukan peningkatan representasi migran dalam lembaga pemerintah, pelatihan anti-bias untuk birokrat dan penyedia layanan publik, serta media yang lebih inklusif dan sensitif budaya. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas migran menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang responsif. Integrasi sejati hanya dapat dicapai jika negara menjamin kesetaraan peluang dan pengakuan identitas secara menyeluruh (Haenraets & Roosma, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan integrasi pekerja migran di Swedia dan Belgia menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Swedia, meskipun secara formal menerapkan kebijakan integrasi yang inklusif dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia, masih menghadapi kendala serius dalam implementasi kebijakan akibat diskriminasi struktural dan minimnya representasi migran dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, Belgia menjalankan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis nilai-nilai budaya dominan, yang menghasilkan fragmentasi identitas di kalangan migran dan menciptakan ketimpangan akses terhadap layanan serta partisipasi sosial. Kedua negara menunjukkan bahwa integrasi bukan sekadar proses administratif, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, persepsi publik, dan kondisi politik domestik. Ketidakseimbangan antara aturan formal dan penerimaan sosial menjadi salah satu penyebab utama kegagalan integrasi yang menyeluruh.

munculnya populisme kanan dan meningkatnya sentimen xenophobia di kedua negara memperkuat tekanan terhadap kebijakan integrasi yang inklusif. Retorika populis yang memosisikan migran sebagai ancaman ekonomi dan identitas nasional telah menggeser arah kebijakan ke model yang lebih protektif dan bersyarat. Akibatnya, para pekerja migran tidak hanya menghadapi kendala struktural, tetapi juga tantangan sosial dalam membangun identitas dan rasa memiliki di masyarakat baru. Dalam kondisi ini, banyak migran terpaksa mengembangkan strategi adaptasi informal melalui komunitas atau jaringan sosial mereka sendiri. Oleh karena itu, upaya integrasi yang berhasil harus menggabungkan pendekatan struktural dan kultural secara simultan, memperkuat perlindungan hak migran, serta mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif melalui perubahan sikap publik dan keberpihakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alba, R., & Nee, V. (2015). *Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674020115>

Cristóbal Rovira Kaltwasser, & Mudde, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>

De Coninck, D., & Solano, G. (2023). Integration policies and migrants' labour market outcomes: A local perspective based on different regional configurations in the EU. *Comparative Migration Studies*, 11(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s40878-023-00347-y>

Dekker, R. (2017). Frame ambiguity in policy controversies: Critical frame analysis of migrant integration policies in Antwerp and Rotterdam. *Critical Policy Studies*, 11(2), 127–145. <https://doi.org/10.1080/19460171.2016.1147365>

Eick, G. M., & Larsen, C. A. (2022). Welfare chauvinism across benefits and services. *Journal of European Social Policy*, 32(1), 19–32. <https://doi.org/10.1177/09589287211023047>

Groglopo, A., Ahmadi, F., & Munobwa, J. S. (2023a). Structural Racism in Sweden: Framing Attitudes towards Immigrants through the Diversity Barometer Study (2005–2022). *Social Sciences*, 12(7), 421. <https://doi.org/10.3390/socsci12070421>

Groglopo, A., Ahmadi, F., & Munobwa, J. S. (2023b). Structural Racism in Sweden: Framing Attitudes towards Immigrants through the Diversity Barometer Study (2005–2022). *Social Sciences*, 12(7), 421. <https://doi.org/10.3390/socsci12070421>

Haenraets, R., & Roosma, F. (2024). Welfare chauvinism in times of crises: The impact of the radical right political discourse. *Journal of European Social Policy*, 34(2), 159–174. <https://doi.org/10.1177/09589287231224601>

Ide, T., & Mello, P. A. (2022). QCA in International Relations: A Review of Strengths, Pitfalls, and Empirical Applications. *International Studies Review*, 24(1), viac008. <https://doi.org/10.1093/isr/viac008>

Lamont, C. (2015). *RESEARCH METHODS IN INTERNATIONAL RELATION*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd.

Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. *Comparative Political Studies*, 51(13), 1667–1693. <https://doi.org/10.1177/0010414018789490>

Padmi, M. F., & Yulianti, Z. (2021). Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017-2018. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 6(2). <https://doi.org/10.52447/gij.v6i2.4763>

Pratama, R. (2021). Imigran dan Warga Keturunan Jepang di Amerika Serikat: Sentimen-Sentimen Terhadapnya Dulu dan Kini. *KIRYOKU*, 5(1), 63–73. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.63-73>

Torreken, C., Kavadias, D., & Bensaid, N. (2023). Being “Both”: Identifications of Second and Third Generation Brussels Muslim Youths towards the Country of Origin and the Country of Residence. *Social Sciences*, 12(6), 350. <https://doi.org/10.3390/socsci12060350>

Van Meeteren, M., & Sur, M. (2020a). Territorial Ironies: Deservingness as a Struggle for Migrant Legitimacy in Belgium. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 33(4), 575–589. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09360-w>

Van Meeteren, M., & Sur, M. (2020b). Territorial Ironies: Deservingness as a Struggle for Migrant Legitimacy in Belgium. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 33(4), 575–589. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09360-w>

Zati Rizqi Muhammad. (2024). Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya. *Jurist-Diction*, 7(1), 165–186. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051>